1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. Pada Maret 2026, IHK Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm), atau lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang tercatat sebesar 0,95% (mtm). Faktor penyebab inflasi tersebut adalah peningkatan permintaan bahan pokok strategis dalam menyambut Idulfitri 1447 H. Sementara itu, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 3,79% (yoy). Secara tahunan, efek - normalisasi penerapan kebijakan diskon tarif listrik di Tahun 2025 masih berdampak pada tingkat inflasi di bulan Maret 2026. Inflasi Jawa Timur secara bulanan tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi bulanan nasional (0,41%; mtm) serta lebih tinggi secara tahunan dibandingkan inflasi nasional (3,48%; yoy). Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,50. Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 5,31 persen dengan IHK sebesar 116,47, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Gresik sebesar 3,16 per sen dengan IHK sebesar 109,72.
    2. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas peternakan dan hortikultura di tengah tingginya permintaan menyambut HBKN Idulfitri 1447 Hijriah. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 1,59% (mtm) dengan andil 0,45%, lebih rendah dari periode Februari yang tercatat 2,26% (mtm) dengan andil 0,62%. Kelompok Transportasi mengalami deflasi sebesar -0,23% (mtm) dengan andil -0,03% dipengaruhi kebijakan diskon tarif angkutan udara selama periode Ramadhan-Idulfitri. Komoditas angkutan udara tercatat deflasi sebesar -6,74% (mtm) dengan andil -0,09%. Deflasi tersebut dipengaruhi oleh implementasi kebijakan diskon tarif angkutan udara serta lebih rendanhnya harga avtur jika dibandingkan Februari 2026.
    3. Tren penurunan harga emas global yang turut berdampak pada harga emas perhiasan mendorong deflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Komoditas emas perhiasan pada periode laporan mengalami deflasi sebesar -3,15% (mtm) memiliki andil -0,08%. Tingkat inflasi komoditas emas ini lebih rendah dari periode Februari 2026 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 8,26% dengan andil 0,20%. Akibatnya, inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Maret 2026 mengalami deflasi sebesar -0,89% (mtm) dengan andil -0,07%.
    4. Dalam perkembangannya, inflasi tahunan Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode Februari 2026. Inflasi tahunan sebesar 3,79% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,88% (yoy). Dampak normalisasi penerapan kebijakan diskon tarif listrik pada tahun 2025 masih memberikan tekanan terhadap tingkat inflasi tahunan Maret 2026. Secara tahunan, tekanan inflasi bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 16,31% (yoy) dengan andil 1,13% atau lebih rendah dari Februari 2026 sebesar 18,59% (yoy) dengan andil 1,29%. Harga emas global pada Maret 2026 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 mendorong kelompok dimaksud mengalami tekanan inflasi.
    5. Pada bulan April 2026, inflasi bulanan diprakirakan lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2026.Hal tersebut sejalan dengan prakiraan normalisasi mobilitas dan permintaan masyarakat pasca HBKN Idulfitri. Selain itu, panen raya padi pada bulan Maret hingga awal April 2026 turut diprakirakan mendukung keterjangkauan harga pada komoditas beras. Dengan memperhatikan realisasi inflasi bulan April 2026, beberapa indikator terkini, dan upaya pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi Jawa Timur, inflasi Jawa Timur pada tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi 2,5% ± 1%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I-2026, kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi tahunan (*yoy*) antara lain:

1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada bulan Maret 2026 mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Inflasi pada periode laporan terpantau sebesar 3,75% (yoy) dengan andil 1,07% lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan inflasi 3,84% (yoy) dengan andil 1,08%, Komoditas utama yang mendorong inflasi adalah daging ayam ras (inflasi 17,32% (yoy); andil 0,99%), beras (inflasi 4,13% (yoy); andil 0,18%), telur ayam ras (inflasi 8,53% (yoy); andil 0,09%), sigaret kretek mesin (inflasi 4,21% (yoy); andil 0,08%), dan daging sapi (inflasi 8,25% (yoy); andil 0,07%). Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada periode ini bersumber dari dua faktor utama. Pertama, peningkatan permintaan yang signifikan seiring momen Ramadan dan HBKN Idulfitri mendorong lonjakan harga pada komoditas peternakan, khususnya daging ayam ras dan telur ayam ras. Kedua, produktivitas yang kurang optimal pada komoditas hortikultura akibat curah hujan tinggi turut membatasi pasokan di tengah permintaan yang meningkat, sehingga memperkuat tekanan harga pada komoditas seperti cabai rawit dan tomat. Harga beras medium juga tercatat mengalami kenaikan dari 12.438/kg di Maret 2025 menjadi Rp12.899 pada Maret 2026. Kenaikan harga beras secara tahunan ini utamanya terjadi seiring penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 2/2025 yang mendorong pembentukan struktur harga baru pada komoditas beras sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan penyesuaian batas harga eceran beras melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 299 Tahun 2025 pada 22 Agustus 2025 guna menjaga stabilitas harga.
2. Secara tahunan, kelompok transportasi mengalami inflasi yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Inflasi tercatat sebesar 1,14% (yoy) dengan andil 0,14%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada periode sebelumnya yang tercatat sebesar 0,87% (yoy) dengan andil 0,11%. Kenaikan pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu angkutan udara dengan andil 0,07%, mobil dengan andil 0,06%, serta sepeda motor dengan andil 0,02%. Adapun kenaikan harga mobil dan sepeda motor dipengaruhi oleh peningkatan biaya bahan baku impor. Lebih lanjut, kenaikan komoditas angkutan udara didorong oleh peningkatan harga avtur di Bandara Juanda yang tercatat sebesar Rp15.236,97 per liter pada Maret 2026, meningkat dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp14.914 per liter yang didorong oleh ekskalasi konflik geopolitik.
3. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi pada periode laporan tercatat sebesar 16,31% (yoy) dengan andil 1,13%, menurun dibandingkan dengan Bulan Februari 2026 sebesar 18,59% (yoy) dengan andil 1,29%. Pendorong utama inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain emas perhiasan dengan inflasi 64,76% (yoy) dengan andil 1,02%, pasta gigi dan pembalut wanita dengan masing-masing andil 0,02%, serta sabun mandi dengan andil sebesar 0,01%. Peningkatan kenaikan harga emas dunia yang signifikan terjadi akibat peningkatan permintaan baik di tingkat institusi maupun masyarakat sebagai safe haven asset didukung ekspektasi berlanjutnya kenaikan harga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    - Keterjangkauan Harga

1. Pelaksanaan Pasar Murah Etalase Pengendalian Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile dengan

menjual komoditas strategis di 11 titik yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Pelaksanaan di Bulan Maret telah terjadi di Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Gresik serta Kota Surabaya. Komoditas yang dijual seperti beras SPHP, beras medium, minyak goreng merk Minyakita, serta gula pasir yang harganya di bawah harga pasar di Jawa Timur dan HET.

2. Pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sebanyak 460 kali yang menjual komoditas bawang merah, telur ayam, beras, serta cabai merah.
3. Disperindag Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pasar murah gebyar Ramadan oleh Disperindag Prov. Jatim selama Bulan Maret sebanyak 10 kali yang menjual komoditas strategis
4. Pelaksanaan sidak pasar dilakukan oleh satgas pangan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur seperti di Kota Kediri, Kab. Ngawi, serta Kota Surabaya untuk memastikan harga di pasar terkait stabil di tengah kenaikan permintaan menjelang HBKN Idulfitri.

◦ Ketersediaan Pasokan

1. Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Jatim melakukan kembali Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) setelah pada akhir tahun 2025 sebanyak 50 kali di wilayah Jatim. Di tahun 2026 ini, telah terlaksana sebanyak 17 kali dengan rincian 7 kali di Bulan Januari 2026, dan 10 kali secara berturut turut sejak tanggal 16-25 Maret 2026. Pelaksanaan OMC ini untuk meminimalisasi dampak bencana hidrometeorologi guna mendukung ketersediaan pasokan.
2. Penerapan pola build up stock untuk komoditas BBM oleh Pertamina Patra Niaga sebagai langkah untuk menyiapkan pasokan BBM dalam menunjang masa mudik menjelang Idulfitri dan mengantisipasi disrupsi rantai pasok energi akibat konflik geopolitik.
3. Pencanangan gerakan tanam tanaman pertanian cepat panen dan pelatihan pembuatan pestisida beserta pupuk organik cair oleh Pemda dan Bank Indonesia Kediri untuk meningkatkan ketersediaan pasokan.
4. Sidak pasar dilakukan secara langsung oleh Bupati Kab. Mojokerto dan Bupati Banyuwangi guna memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi jelang HBKN Idulfitri.

◦ Kelancaran Distribusi

1. Pemanfaatan truk hibah Bl Jatim yang diberikan kepada Pemprov Jatim sebagai alat pengangkutan barang/komoditas dalam menunjang terlaksananya pasar murah di 9 kabupaten/kota diantaranya Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Gresik serta Kota Surabaya.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pemberian alat keselamatan kepada relawan penjaga lalu lintas.
3. Penyelenggaraan program Mudik Gratis untuk mendukung mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya. Sekitar 4000 pemudik diberangkatkan dengan menggunakan 100 armada bus menuju kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperlancar arus mudik.
4. Penyelenggaraan program Mudik Gratis jalur laut dengan rute Jangkar Raas dan Jangkar Sapudi sebanyak 12 trip dengan kapasitas mencakup 250 penumpang dan 100 unit kendaraan sepeda motor.
5. Layanan Trans Jatim digratiskan selama periode Idulfitri (21-22 Maret 2026) sebagai komitmen Pemprov untuk memudahkan mobilitas masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas silaturahmi,

Pemprov Jatim melalui UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Bandara Abdurrachman

6. Saleh turut mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat pada hari raya idul fitri 1447 H/2026 melalui penurunan tarif jasa kebandarudaraan (PJP2U dan PJP4U) sebesar 50%.
   - Komunikasi Efektif

1. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) di Kabupaten Mojokerto pada 12 Maret 2026 yang dihadiri langsung oleh Bupati Kab. Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra Lc, untuk meningkatkan kesiapan pasokan terhadap lonjakan permintaan yang biasanya terjadi menjelang HBKN Idulfitri.
2. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) di Kota Malang dan Kota Probolinggo pada 4 dan 5 Maret 2026 untuk mempersiapkan ketersediaan pasokan menjelang HBKN Idulfitri,
3. Pemanfaatan platform monitoring harga se-Jawa Timur melalui platform SISKAPERBAPO dengan akurasi dan korelasi tinggi terhadap data inflasi BPS didukung platform monitoring harga di 26 Kab/Kota;
4. Diskominfo Jatim mempublikasikan rata-rata bahan pokok di Jatim yang berasal dari data siskaperbapo serta mengajak untuk bijak berbelanja

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari perkembangan inflasi yang relatif terkendali, di mana inflasi bulanan Jawa Timur tercatat sebesar 0,41% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi bulanan nasional. Sementara itu, inflasi tahunan Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,79% (yoy), menurun dibandingkan inflasi tahunan Februari 2026 yang mencapai 4,88% (yoy). Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh normalisasi dampak penerapan kebijakan diskon tarif listrik pada tahun 2025. Di sisi lain, kenaikan harga emas global pada Maret 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya turut memberikan tekanan inflasi pada kelompok perhiasan. Ke depan, risiko yang perlu diantisipasi antara lain meningkatnya eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi global. Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak dunia beserta produk turunannya, termasuk produk petrokimia, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan tekanan inflasi domestik. Dalam rangka menjaga stabilitas inflasi, Sekretariat TPID Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Kerangka Kerja Strategis Pengendalian Inflasi Jawa Timur Tahun 2025 melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 500/11530/021.1/2025 tanggal 27 Maret 2025. Selain itu, TPID Provinsi Jawa Timur juga telah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri pada tanggal 26 Februari 2026 yang menghasilkan berbagai rekomendasi *quick wins* sebagai langkah percepatan pengendalian inflasi. Melalui penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan mengimplementasikan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, TPID Provinsi Jawa Timur berhasil menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung terpeliharanya stabilitas harga di daerah. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Sekretariat TPID Provinsi telah menetapkan Kerangka Kerja Strategis Pengendalian Inflasi Jawa Timur Tahun 2025 melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 500/11530/021.1/2025 tanggal 27 Maret 2025 serta penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Jawa Timur menjelang HBKN Idul Fitri pada tanggal 26 Februari 2026 yang menghasilkan rekomendasi quick wins untuk dijalankan oleh TPID Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi quick wins HLM

TPID Provinsi Jawa Timur pada K1 (Keterjangkauan Harga) dan K2 (Ketersediaan Pasokan) diarahkan pada penguatan stabilitas harga dan kecukupan pasokan menjelang HBKN Idulfitri. Pada K1, dilakukan intensifikasi pemantauan harga melalui sinergi Satgas Pangan dan aparat penegak hukum, serta optimalisasi pasar murah seperti EPIK Mobile di 13 kabupaten/kota, pelaksanaan ratusan pasar murah oleh pemda dan sidak pasar untuk memastikan harga tetap terkendali. Pada K2, penguatan produktivitas dan cadangan pasokan didukung oleh Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penerapan build up stock BBM, gerakan tanam cepat panen dan pelatihan pupuk organik, serta sidak kepala daerah guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman. Sementara itu, pada K3 (Kelancaran Distribusi), quick wins difokuskan pada penyelenggaraan mudik gratis darat dan laut, dukungan moda transportasi intra dan luar provinsi, penurunan beberapa komponen tarif angkutan udara di Bandara Abdurrachman Saleh serta pemanfaatan truk hibah Bl untuk distribusi komoditas dalam program EPIK Mobile, serta penggratisan layanan Trans Jatim. Pada K4 (Komunikasi Efektif), quick wins diarahkan pada pengendalian ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga dan edukasi publik, yang diwujudkan melalui pelaksanaan HLM di kabupaten/kota guna menindaklanjuti rekomendasi HLM TPID se-Jawa Timur, optimalisasi platform SISKAPERBAPO, publikasi harga pangan oleh Diskominfo di beberapa media publikasi, serta kampanye belanja bijak untuk mencegah panic buying dan menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mendukung terkendalinya inflasi Jawa Timur tahun 2026, sinergi dan koodinasi yang kolaboratif antara TPID Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, TPIP serta *stakeholder* lainnya terus diintensifkan. TPID Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan strategi 4K dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2027 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/364-021/013/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Sejalan dengan isu dan tantangan terkini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian inflasi, beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi yang digagas antara lain:

1. Pada aspek keterjangkauan harga, pelaksanaan pasar murah perlu diperluas secara lebih terarah dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami tekanan inflasi tinggi dan komoditas penyumbang utama inflasi, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, dan bawang. Optimalisasi pemanfaatan EPIK Mobile perlu didukung dengan penyempurnaan mekanisme distribusi, penambahan frekuensi pelaksanaan, serta penguatan sinergi dengan Perum Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
2. Pada aspek ketersediaan pasokan, perlu dilakukan penguatan manajemen pasokan melalui pengembangan korporasi petani, peningkatan produktivitas komoditas hortikultura dan peternakan, perluasan gerakan tanam, serta penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Upaya mitigasi risiko perubahan iklim melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penyediaan sarana produksi pertanian, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan produksi juga perlu terus diperkuat guna menjaga kesinambungan pasokan;
3. Pada aspek kelancaran distribusi, diperlukan peningkatan efisiensi rantai pasok melalui optimalisasi jaringan distribusi antarwilayah, pemanfaatan armada logistik pemerintah dan swasta, serta penguatan kerja sama antardaerah (KAD) untuk komoditas strategis. Antisipasi terhadap risiko gangguan distribusi akibat eskalasi geopolitik global juga

perlu dilakukan melalui penguatan cadangan energi, koordinasi dengan pelaku distribusi, serta pemantauan biaya logistik secara berkala guna meminimalkan dampak kenaikan biaya transportasi terhadap harga barang;

4. Selanjutnya, pada aspek komunikasi efektif, diperlukan penguatan integrasi data dan digitalisasi pengendalian inflasi melalui optimalisasi pemanfaatan SISKAPERBAPO sebagai dashboard monitoring harga secara real time yang didukung analisis spasial dan sistem peringatan dini. Komunikasi publik juga perlu terus ditingkatkan melalui penyampaian informasi perkembangan harga, edukasi belanja bijak, serta publikasi berbagai langkah pengendalian inflasi secara konsisten guna menjaga ekspektasi masyarakat dan mencegah terjadinya panic buying. Selain itu, pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID perlu terus dioptimalkan sebagai forum evaluasi dan pengambilan kebijakan strategis yang adaptif terhadap dinamika inflasi. Penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan quick wins hasil HLM hingga tingkat kabupaten/kota menjadi penting agar setiap kebijakan pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan

link :
https://docs.google.com/document/d/1zeyxTwGEEBX6gsKuueQDwlKTZQa7uQIp/edit?usp=drive_link&ouid=101083952107436321823&rtpof=true&sd=true